



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG

Wicaksono Aditya Riki¹

Administrasi Publik Universitas Subang
aditwicaksono15@gmail.com

Melani²

Administrasi Publik Universitas Subang
melani12@gmail.com

Jatmika Iwa³

Administrasi Publik Universitas Subang
jatmikaiwa0@gmail.com

Yayat Sudrajat⁴

Administrasi Publik Universitas Subang
yayatsudrajat@unsub.ac.id

Sumarna⁵

Administrasi Publik Universitas Subang
sumarna@unsub.ac.id

Abstrak

Penelitian Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan data secara online maka kelemahan dalam pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan, sedangkan pengelolaan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas menurut Martani dan Lubis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhusus bagi pelaksanaan SIAK. Sistem Informasi Administrasi



Kependudukan sejauh ini sudah berjalan efektif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah berjalan efektif.

Kata kunci: efektivitas Organisasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Abstract

The study of the Effectiveness of the Use of the Population Administration Information System (SIAM) aims to determine the Effectiveness of the Use of the Population Administration Information System (SIAM) at the Population and Civil Registration Service of Subang Regency. The location used as the object of the study is the Use of the Population Administration Information System (SIAM) at the Population and Civil Registration Service of Subang Regency. This study discusses the Effectiveness of the Use of the Population Administration Information System (SIAM) in online data management so that weaknesses in conventional data management can be reduced. The rapid development of information technology has now given rise to a new revolution, namely the transition from a conventional work system to the digital era. In this study, the author uses a qualitative descriptive research method through observation and interviews, literature studies and documentation. The data collection method is obtained directly and documents are obtained in the form of regulations, while data management is done by analyzing the results of interviews and observations. The results of the study indicate that the Effectiveness of the Use of the Population Administration Information System (SIAM) at the Population and Civil Registration Service of Subang Regency is not yet effective according to the theory of effectiveness measurement according to Martani and Lubis. The results of this study indicate that the Population and Civil Registration Service of Subang Regency has the facilities and infrastructure to support the sustainability of the service process provided, especially for the implementation of SIAM. The Population Administration Information System has so far been running effectively at the Population and Civil Registration Service of Subang Regency. The management of SIAM by operators in inputting population data supported by adequate facilities and infrastructure has been running effectively.

Keywords: Organizational effectiveness, Population Administration Information System

Pendahuluan

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi agar dapat memuaskan segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Masyarakat menuntut pelayanan yang efektif dalam berbagai hal yaitu dalam penyelesaian pekerjaan secara efektif atau secara tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Kecepatan pelayanan juga merupakan hal penting karena perlunya target waktu pelayanan dapat diselesaikan.

Permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh pemerintah salah satunya yaitu tentang pelayanan publik yang kurang memuaskan. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Baik pelayanan berupa jasa, barang ataupun pelayanan administrasi lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masih dianggap kurang



efektif karena masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, karena masih banyak prosedur yang berbelit-belit sehingga menghabiskan banyak waktu, serta terdapat oknum aparat pemerintah yang kurang baik dalam melayani masyarakat. Adapun bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan yaitu pengurusan akte kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte nikah, akte kelahiran, akte kematian, pindah kependudukan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan. Adapun Peraturan Bupati Subang tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang adalah Peraturan Bupati Subang Nomor 19 Tahun 2022 (Domestik et al. 2023).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang memiliki wewenang untuk mengurus kegiatan administrasi kependudukan berada di Kabupaten Subang. Adapun bidang dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang yang mengurus dan bertanggung jawab khusus terhadap sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola data kependudukan secara terpusat dan terintegrasi. Tujuan utama dari SIAK adalah untuk mendata, mengelola, dan memperbarui informasi kependudukan warga negara, termasuk pendaftaran kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Berikut adalah beberapa peranan aplikasi SIAK dalam transformasi pelayanan, yaitu Perekaman Data Kependudukan, Pelayanan Terintegrasi, dan Efisiensi Administrasi. Melalui integrasi sistem ini, diharapkan semua proses administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Namun, dalam implementasinya, efektivitas penggunaan SIAK masih menghadapi beberapa tantangan, seperti infrastruktur teknologi yang tidak merata di berbagai daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan teknologi, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat. Selain itu, faktor keamanan data juga menjadi isu penting karena SIAK menyimpan informasi sensitif setiap individu, yang harus dijaga dari potensi kebocoran data dan penyalahgunaan.

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk di Kabupaten Subang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023
1	Binong	36660 Jiwa
2	Blanakan	49099 Jiwa
3	Ciasem	82118 Jiwa
4	Ciater	22549 Jiwa
5	Cibogo	37621 Jiwa



6	Cijambe	32086 Jiwa
7	Cikaum	39232 Jiwa
8	Cipeundeuy	37342 Jiwa
9	Cipunagara	50524 Jiwa
10	Cisalak	31427 Jiwa
11	Compreng	37035 Jiwa
12	Dawuan	32505 Jiwa
13	Jalancagak	35225 Jiwa
14	Kalijati	49975 Jiwa
15	Kasomalang	32139 Jiwa
16	Legonkulon	18091 Jiwa
17	Pabuaran	48601 Jiwa
18	Pagaden	48876 Jiwa
19	Pagaden Barat	28171 Jiwa
20	Pamanukan	43911 Jiwa
21	Patokbeusi	61386 Jiwa
22	Purwadadi	46082 Jiwa
23	Pusakajaya	36714 Jiwa
24	Pusakanagara	32582 Jiwa
25	Sagalaherang	24486 Jiwa
26	Serangpanjang	19895 Jiwa
27	Subang	102699 Jiwa
28	Sukasari	32195 Jiwa
29	Tambakdahan	34479 Jiwa
30	Tanjungsiang	35330 Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penggunaan SIAK pada data jumlah penduduk di Kabupaten Subang menjadi penting untuk mengukur sejauh mana sistem ini berhasil mendukung pengelolaan data kependudukan yang akurat dan responsif. Evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan SIAK, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi pegawai, dan tingkat pemanfaatan sistem oleh masyarakat.

Permasalahan proses dalam pelayanan SIAK yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang yaitu proses pelayanan SIAK yang membutuhkan waktu lama dan tidak ada waktu kepastian kapan pelayanan SIAK tersebut selesai. Dan kurangnya respon yang baik terhadap pegawai kepada masyarakat, yaitu terkait jaringan sistem yang kadang kurang stabil sehingga berdampak pada proses pelayanan dalam pendataan kependudukan sehingga memakan waktu yang cukup lama

Berdasarkan peninjauan awal diatas maka peneliti menemukan adanya ketidak efektifan dalam pelaksanaan program penggunaan aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang yang ditandai oleh beberapa indikator antara lain: Keterbatasan jumlah SDM yang Kompeten. Tidak semua pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan SIAK secara efektif. Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi ini membuat tugas pemrosesan data



kependudukan terpusat pada segelintir individu, yang sering kali terbebani dengan volume pekerjaan yang besar. Keterbatasan Jaringan Internet dan koneksi yang tidak stabil. Efektivitas penggunaan SIAK sangat bergantung pada koneksi internet yang cepat dan stabil, maka dari itu sistem ini terhubung secara nasional, yang mengakibatkan proses pencatatan dan pembaruan data kependudukan terhambat.

Kerangka Teori

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik. Jika ditinjau secara tata bahasa, administrasi publik mempunyai dua kata penyusun, yaitu administrasi dan publik. Dengan demikian, administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau kerja sama sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kata publik diartikan sebagai negara dan warga negara atau masyarakat. Administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa administrasi publik seperti halnya dengan administrasi lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Menurut L D White, administrasi publik terdiri atas semua operasi yang bertujuan guna memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik merupakan penerapan hukum secara terperinci dan sistematis. Bisa juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain merupakan kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, serta lain sebagainya.

Menurut F A Nigro, yang berpendapat bahwa administrasi publik pada intinya merupakan upaya kelompok kooperatif dalam suatu pengaturan publik. Selain itu, Nigro juga mengungkapkan bahwa administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta dalam banyak hal. Lebih lanjut, administrasi publik berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan ke masyarakat.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Definisi "Pelayanan Publik" menurut Mahmudi (2010:223), adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai



upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong (2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" (2014:5) menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain."

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran untuk melihat seberapa jauh suatu organisasi atau program telah mencapai tujuannya. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (Adolph 2016).

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan



tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik organisasi
2. Fitur Lingkungan
3. Karakteristik karyawan
4. Karakteristik Manajemen

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:5) yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi:
2. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi:
3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya (Salfian 2020).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Instansi pelaksana SIAK adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang pengelolaan, pengkajian, penyimpanan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan.

SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi secara berani secara nasional. Sistem penutupan ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Admindex) dengan lebih cepat. Menurut Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Erikson P. Manihuruk, dengan SIAK Terpusat masyarakat akan mendapatkan standar pelayanan yang sama



di setiap daerah. Selanjutnya setelah SIAK Terpusat pengembangan inovasi yang nantinya adalah identitas kependudukan digital (Digital ID) (Pokhrel 2024).

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang berbasis pada informasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun prosedur-prosedur pada metode kualitatif yaitu: pengambilan informan secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Alasan memilih metode penelitian kualitatif penulis ingin memastikan kebenaran data yang ada di lapangan sehingga masalah yang diteliti akan lebih jelas.

Hasil dan Pembahasan

Disdukcapil memiliki peran penting dalam administrasi kependudukan di wilayahnya. Berbagai layanan yang ditawarkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Subang belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM):
Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan SIAK menjadi kendala. Tidak semua operator memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, sehingga mempengaruhi kinerja mereka.
2. Data Kependudukan:
Ketidakakuratan data menjadi masalah, sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam proses input data. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi pegawai untuk meningkatkan ketelitian dalam pengolahan data.
3. Sarana dan Prasarana:
Infrastruktur yang ada, seperti koneksi internet yang tidak stabil, juga berpengaruh terhadap efektivitas SIAK. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional SIAK.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya informasi mengenai syarat pembuatan dokumen dan keterbatasan pengetahuan petugas. Disdukcapil berupaya memperbaiki kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, Disdukcapil disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja SIAK, meningkatkan pelatihan bagi pegawai, serta memperbaiki infrastruktur yang mendukung sistem.

Secara keseluruhan, Disdukcapil Kabupaten Subang memiliki peran vital dalam administrasi kependudukan, namun masih perlu melakukan perbaikan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.



Keberhasilan dalam menjalankan tugas ini akan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang belum dikatakan optimal. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni menjadi salah satu faktornya. Hal itu disebabkan karena di dalam pengoperasian aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tidak semua operator paham dalam mengoperasikan aplikasi SIAK, selain itu tidak semua operatornya adalah sarjana Informasi dan Komunikasi yang memang sangat cocok dengan pengelolaan SIAK sehingga hal itu menjadi salah satu alasan mengapa penggunaan aplikasi SIAK belum efektif.
2. Keakuratan data juga menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang. Hal itu bisa disebabkan oleh ketidaktepatan dalam input data.
3. Ketidakstabilan sinyal (internet) yang menjadi pendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang SIAK.

Referensi

- Adolph. (2016). Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Domestik, A., Nurkholis, N., & Wijayanti, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Digital. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1-15.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martani, S., & Lubis, M. (1987). Efektivitas Organisasi dan Metode Pengukurannya. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pokhrel, S. (2024). Transformasi Digital Sistem Informasi Kependudukan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Informasi Pemerintahan*, 10(2), 112-125.
- Salfian, F. (2020). Peran SIAK Terpusat dalam Administrasi Kependudukan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- White, L. D. (1926). Introduction to the Study of Public Administration. New York: Macmillan.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197-222.